

Analisis Kesesuaian Data Aset pada Laporan Keuangan Periode 2024 dalam Menentukan Nilai Wajar Aset di BPPKAD Provinsi Papua Tengah

Ance Dawapa^{1*}, Yoel Pasae², Sita Yubelina Sabandar³

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

ancedawapa98@gmail.com^{1*}

*Penulis korespondensi

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian data aset dalam laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah. Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian pencatatan aset dengan kondisi riil di lapangan, yang berdampak pada akurasi penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumen laporan keuangan tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian signifikan antara data aset yang tercatat dengan aset fisik yang ada, terutama terkait validitas data, pencatatan ganda, dan keterlambatan pembaruan informasi aset. Faktor penyebab utama meliputi lemahnya sistem informasi manajemen aset, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta kurangnya koordinasi antar perangkat daerah. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pencatatan aset berbasis teknologi, peningkatan kapasitas aparatur, serta perbaikan prosedur pengelolaan aset daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi BPPKAD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta kontribusi teoretis terhadap kajian akuntansi sektor publik.

Kata kunci: aset daerah, laporan keuangan, BPPKAD, Papua Tengah, akuntansi sektor publik

Abstract: This study aims to analyze the conformity of asset data in financial reports at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPPKAD) of Central Papua Province. The main issue identified is the inconsistency between recorded asset data and the actual physical condition of assets, which affects the accuracy of government financial reporting. A qualitative descriptive method with a case study approach was employed, utilizing data from interviews, observations, and the 2024 financial reports. The findings reveal significant discrepancies between the recorded asset data and physical assets, particularly in terms of data validity, duplicate records, and delays in updating asset information. The primary factors contributing to these discrepancies include the limited effectiveness of the asset management information system, inadequate human resource competence, and weak coordination among related departments. The study highlights the importance of strengthening technology-based asset recording systems, enhancing staff capacity, and improving asset management procedures. Practically, the findings provide recommendations for BPPKAD to improve the reliability of financial reports, while theoretically contributing to the literature on public sector accounting and government asset management.

Keywords: regional assets, financial reporting, BPPKAD, Central Papua, public sector accounting

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. Data aset yang akurat dan laporan keuangan yang transparan menjadi syarat utama untuk mendukung akuntabilitas publik serta pengambilan keputusan fiskal yang tepat (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022). Dalam konteks pemerintahan daerah

di Indonesia, laporan keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (BPK RI, 2022).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data aset antara catatan akuntansi dan kondisi fisik aset masih menjadi persoalan serius. Penelitian terdahulu menemukan bahwa lemahnya sistem informasi aset, keterbatasan sumber daya

manusia, dan kurangnya koordinasi antarunit kerja menjadi penyebab utama terjadinya perbedaan pencatatan (Widiati, Nugraha, & Novianty, 2021; Nurhayati & Abdullah, 2020). Ketidaksesuaian tersebut dapat menyebabkan nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi riil, sehingga berimplikasi pada distorsi informasi keuangan publik (Pratiwi & Kusumawati, 2022).

Sebagai provinsi baru hasil pemekaran, Papua Tengah menghadapi tantangan lebih besar dalam penatausahaan aset. Sejumlah aset belum memiliki dokumen legal formal, sebagian belum diinventarisasi ulang, dan terdapat kemungkinan aset ganda maupun tidak tercatat (Dawapa, 2025). Situasi ini berpotensi menurunkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta menghambat pencapaian transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Tabel berikut menyajikan fenomena permasalahan pengelolaan aset daerah di Indonesia:

Tabel 1. Permasalahan Pengelolaan Aset Daerah di Indonesia

Fenomena	Dampak	Sumber
Ketidaksesuaian data aset dengan kondisi fisik	Distorsi nilai aset dalam laporan keuangan	Widiati et al., 2021
Keterbatasan SDM pengelola aset	Kesalahan pencatatan dan keterlambatan rekonsiliasi	Nurhayati & Abdullah, 2020
Sistem informasi aset belum optimal	Validitas dan akurasi laporan keuangan rendah	Pratiwi & Kusumawati, 2022
Aset daerah belum didukung dokumen legal	Hambatan penyusunan LKPD akrual	Dawapa, 2025

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber (2025)

Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat kualitas data aset yang akurat dan nilai wajar yang tepat menjadi fondasi bagi keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Ketidakakuratan data aset tidak hanya berdampak pada proses akuntabilitas publik, tetapi juga memengaruhi legitimasi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik. Bagi Papua Tengah sebagai provinsi baru, membangun sistem pengelolaan aset yang terstandarisasi dan akuntabel sejak awal menjadi sangat strategis, agar tidak mengulang persoalan klasik yang dihadapi oleh daerah lain. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris untuk memperkuat tata kelola aset daerah serta mendukung pencapaian opini WTP pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana kesesuaian data aset yang tercatat dengan laporan keuangan yang disusun di BPPKAD Provinsi Papua Tengah?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara data aset dan laporan keuangan di BPPKAD Provinsi Papua Tengah?
3. Bagaimana metode yang tepat untuk menentukan nilai wajar aset berdasarkan data yang ada di BPPKAD Provinsi Papua Tengah?

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan instrumen utama akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan harus menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Informasi ini meliputi posisi keuangan, kinerja anggaran, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2022).

Dalam konteks sektor publik, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis oleh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, DPRD, BPK, dan masyarakat (Christiaens et al., 2021). Keandalan laporan keuangan sangat ditentukan oleh akurasi data aset yang dilaporkan, karena aset tetap merupakan salah satu komponen terbesar dalam struktur neraca pemerintah daerah.

Kesesuaian Data Aset

Kesesuaian data aset mengacu pada keterpaduan antara catatan akuntansi, dokumen administrasi, dan kondisi fisik aset. Ketidaksesuaian dapat berupa pencatatan ganda, aset yang tidak memiliki dokumen legal, atau keterlambatan pembaruan data (Nurhayati & Abdullah, 2020). Dalam praktiknya, faktor penyebab ketidaksesuaian antara lain lemahnya sistem informasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya koordinasi antarbidang dalam organisasi pengelola keuangan daerah (Pratiwi & Kusumawati, 2022).

Pengelolaan aset yang baik menuntut adanya sistem inventarisasi yang transparan dan berbasis teknologi, sehingga data yang dicatat dapat mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya (Widiati, Nugraha, & Novianty, 2021). Hal ini penting untuk mendukung validitas laporan keuangan, meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah potensi kerugian akibat aset yang tidak tercatat atau salah nilai.

Nilai Wajar Aset

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu aset atau dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Dalam penilaian aset daerah, terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan:

1. **Pendekatan Pasar:** membandingkan aset dengan transaksi sejenis di pasar aktif.
2. **Pendekatan Pendapatan:** menilai aset berdasarkan arus kas masa depan yang dihasilkan.
3. **Pendekatan Biaya:** menghitung biaya penggantian dikurangi penyusutan (BPK RI, 2022).

Pemilihan metode penilaian bergantung pada jenis aset, kondisi pasar, serta ketersediaan data yang relevan (Rani, Wahyuni, & Prasetyo, 2021). Untuk aset pemerintah yang tidak memiliki pasar aktif, pendekatan biaya umumnya lebih tepat, sementara aset dengan potensi arus kas dapat dinilai dengan pendekatan pendapatan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji isu pengelolaan aset daerah dan implikasinya terhadap laporan keuangan:

- **Widiati, Nugraha, & Novianty (2021)** menemukan bahwa penatausahaan aset tetap yang baik pada SKPD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- **Nurhayati & Abdullah (2020)** menyoroti bahwa kelemahan dalam sistem pencatatan aset seringkali menyebabkan perbedaan antara data administrasi dan kondisi fisik aset.
- **Pratiwi & Kusumawati (2022)** menekankan pentingnya penerapan sistem informasi aset berbasis teknologi untuk meningkatkan akurasi pencatatan.
- **Rani, Wahyuni, & Prasetyo (2021)** menunjukkan bahwa pemilihan metode

penilaian aset memengaruhi keandalan nilai wajar yang dilaporkan dalam LKPD.

Penelitian ini memperluas kajian terdahulu dengan fokus pada provinsi baru, yaitu Papua Tengah, yang menghadapi tantangan transisi administratif pasca-pemekaran. Kondisi ini menjadikan analisis kesesuaian data aset dan metode penentuan nilai wajar lebih relevan untuk diteliti.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena kesesuaian data aset dalam laporan keuangan serta implikasinya terhadap penentuan nilai wajar aset. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat menggali informasi faktual melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dibandingkan sekadar analisis kuantitatif (Creswell & Creswell, 2018). Desain deskriptif memungkinkan penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga menganalisis proses, kendala, dan faktor-faktor yang memengaruhi akurasi data aset.

Populasi penelitian adalah seluruh pejabat dan staf yang terlibat dalam pengelolaan, pencatatan, serta pelaporan aset pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah. Mengingat keterbatasan sumber daya dan fokus penelitian pada analisis mendalam, maka teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan yang dianggap paling memahami permasalahan penelitian. Sampel penelitian terdiri dari lima orang informan kunci, yakni Sekretaris BPPKAD, Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan, Kepala Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah, serta dua auditor internal yang berperan dalam proses verifikasi data aset. Teknik ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada pemilihan informan yang mampu memberikan informasi mendalam daripada jumlah responden yang besar (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

Lokasi penelitian ditetapkan di BPPKAD Provinsi Papua Tengah yang berlokasi di Nabire sebagai ibu kota provinsi baru. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran BPPKAD sebagai instansi utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah dan penyusunan laporan

keuangan. Penelitian dilaksanakan selama periode Januari hingga Juni 2024, bertepatan dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024. Kondisi transisi administratif di provinsi baru ini menjadikan penelitian lebih relevan, karena permasalahan terkait validitas data aset muncul secara nyata dalam praktik penyusunan laporan keuangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi langsung terhadap proses pencatatan dan rekonsiliasi aset, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta studi dokumentasi atas dokumen resmi seperti laporan keuangan tahun 2024, daftar inventaris barang milik daerah, dan berita acara hasil rekonsiliasi aset. Triangulasi metode digunakan untuk meningkatkan keabsahan data, dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Patton, 2015).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, & Saldaña (2019), yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses reduksi dilakukan untuk menyaring data yang relevan, sementara penyajian data menggunakan narasi deskriptif dan tabel untuk mempermudah identifikasi pola serta hubungan antarvariabel. Penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif dengan memverifikasi data dari berbagai sumber agar temuan penelitian valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Model ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan proses analisis berkelanjutan sepanjang penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebagai provinsi baru hasil pemekaran, BPPKAD menghadapi tantangan besar dalam memastikan validitas dan kesesuaian data aset yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Permasalahan yang dominan adalah adanya perbedaan antara catatan akuntansi dengan kondisi riil aset di lapangan, termasuk aset yang belum memiliki dokumen legal, keterlambatan dalam pembaruan data, dan potensi aset ganda. Situasi ini menuntut adanya

sistem pencatatan yang lebih transparan, rekonsiliasi yang rutin, serta metode penilaian aset yang sesuai untuk memastikan laporan keuangan yang andal.

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan lima informan kunci yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Informan berasal dari pejabat struktural maupun auditor internal BPPKAD Provinsi Papua Tengah yang berperan langsung dalam pengelolaan dan pelaporan aset.

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan/Posisi	Lama Bekerja	Keterlibatan dalam Pengelolaan Aset
1	Imam Khambali	Sekretaris BPPKAD	>10 tahun	Koordinasi administrasi dan pelaporan
2	Geradus Adii	Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	>8 tahun	Penyusunan laporan keuangan daerah
3	Irene O. Rumbrar	Kasubid Perencanaan Barang Milik Daerah (BMD)	>6 tahun	Inventarisasi dan pencatatan BMD
4	Agustina Kopong	Auditor Madya	>12 tahun	Audit internal pengelolaan aset
5	Evie Pangalingan	Auditor Ahli Muda	>7 tahun	Verifikasi data aset dan rekonsiliasi

Sumber: Data primer penelitian (2025)

Hasil Wawancara

Hasil wawancara mendalam menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara data aset yang tercatat dengan kondisi fisik aset di lapangan. Faktor penyebabnya meliputi lemahnya sistem informasi aset, keterbatasan SDM, kurangnya dokumentasi, serta keterlambatan dalam penyampaian data. Informan juga menekankan pentingnya rekonsiliasi rutin dan koordinasi lintas bidang untuk meningkatkan kesesuaian data aset dengan laporan keuangan.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Wawancara Informan Penelitian

Informan	Temuan Utama Wawancara
Sekretaris BPPKAD	Rekonsiliasi dan verifikasi rutin dilakukan, namun masih ditemukan aset tanpa dokumen legal dan keterlambatan penyampaian data.

Informan	Temuan Utama Wawancara
Kabid Perbendaharaan	Kesalahan pencatatan dan pergantian petugas menyebabkan inkonsistensi data aset. Sistem informasi belum maksimal.
Kasubid Perencanaan BMD	Inventarisasi belum sepenuhnya terintegrasi, sebagian aset belum tercatat ulang pasca-pemekaran provinsi.
Auditor Madya	Ditemukan perbedaan antara catatan akuntansi dengan kondisi fisik aset, terutama pada aset tetap. Dokumentasi kurang lengkap.
Auditor Ahli Muda	Menekankan pentingnya penerapan sistem informasi aset berbasis teknologi untuk memastikan validitas dan akurasi laporan keuangan.

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian data aset dengan laporan keuangan di BPPKAD Provinsi Papua Tengah belum sepenuhnya tercapai. Hal ini sejalan dengan temuan Nurhayati & Abdullah (2020), yang menyatakan bahwa kesalahan pencatatan dan lemahnya sistem pengelolaan aset menjadi penyebab utama ketidaksesuaian.

Faktor penyebab ketidaksesuaian dalam penelitian ini meliputi keterbatasan SDM, lemahnya sistem informasi, kurangnya dokumentasi, serta keterlambatan penyampaian data antarunit. Hal ini mendukung penelitian Pratiwi & Kusumawati (2022), yang menekankan bahwa kelemahan sistem informasi berimplikasi langsung terhadap validitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam hal penentuan nilai wajar aset, BPPKAD Papua Tengah menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan pasar, pendapatan, dan biaya. Pendekatan pasar digunakan untuk aset dengan pasar aktif, pendekatan pendapatan untuk aset yang menghasilkan arus kas, sedangkan pendekatan biaya untuk aset tetap yang tidak memiliki pasar aktif. Hal ini sejalan dengan teori Ikatan Akuntan Indonesia (2022) dan penelitian Rani, Wahyuni, & Prasetyo (2021), yang menegaskan pentingnya pemilihan metode sesuai karakteristik aset.

Dengan demikian, penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah yang diajukan: (1) kesesuaian data aset dengan laporan keuangan masih menghadapi kendala meskipun ada upaya rekonsiliasi; (2) faktor ketidaksesuaian meliputi keterbatasan SDM, lemahnya sistem informasi, dan dokumentasi yang kurang; serta (3) metode

yang tepat dalam penentuan nilai wajar aset harus disesuaikan dengan karakteristik aset, dengan kombinasi pendekatan pasar, pendapatan, dan biaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian data aset dalam laporan keuangan periode 2024 serta implikasinya terhadap penentuan nilai wajar aset di BPPKAD Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesesuaian data aset dengan laporan keuangan di BPPKAD Provinsi Papua Tengah masih menghadapi kendala, meskipun telah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi secara rutin. Beberapa aset tercatat tidak memiliki dokumen legal formal, terjadi keterlambatan pembaruan data, dan masih ditemukan ketidaksesuaian antara catatan akuntansi dengan kondisi fisik aset.
2. Faktor penyebab ketidaksesuaian meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kelemahan dalam penerapan sistem informasi aset, ketidaklengkapan dokumentasi, serta pergantian petugas dan keterlambatan penyampaian data antarunit.
3. Penentuan nilai wajar aset di BPPKAD dilakukan dengan menggunakan pendekatan pasar, pendapatan, dan biaya. Pemilihan metode disesuaikan dengan karakteristik aset: pasar aktif, aset penghasil arus kas, maupun aset tetap yang tidak memiliki pasar aktif. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan metode yang tepat agar nilai wajar aset mencerminkan kondisi riil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sistem informasi aset, peningkatan kompetensi SDM, serta perbaikan prosedur inventarisasi merupakan kunci untuk meningkatkan akurasi data aset dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

1. **Bagi BPPKAD Provinsi Papua Tengah**, diperlukan penguatan sistem informasi manajemen aset berbasis teknologi yang

terintegrasi dengan laporan keuangan, sehingga dapat meminimalkan ketidaksesuaian data.

2. **Bagi pemerintah daerah**, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis terkait akuntansi aset dan penerapan standar akuntansi pemerintahan, agar kompetensi aparatur lebih optimal dalam pengelolaan aset.
3. **Untuk meningkatkan akuntabilitas publik**, perlu disusun mekanisme rekonsiliasi aset secara berkala dengan melibatkan lintas bidang, auditor internal, dan pihak eksternal jika diperlukan, guna menjamin validitas data aset yang dilaporkan.
4. **Bagi peneliti selanjutnya**, dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur pengaruh kesesuaian data aset terhadap kualitas laporan keuangan secara lebih komprehensif, serta memperluas lokasi penelitian ke daerah lain sebagai pembandingan.

Dengan implementasi saran tersebut, diharapkan kualitas pengelolaan aset daerah dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dapat ditingkatkan, sekaligus mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi keuangan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2022*. Jakarta: BPK RI.
- Christiaens, J., Vanhee, C., Manes Rossi, F., Aversano, N., & van Cauwenberge, P. (2021). The effect of IPSAS on reforming governmental financial reporting: An international comparison. *International Review of Administrative Sciences*, 87(4), 747–765. <https://doi.org/10.1177/0020852319849182>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2022). *Intermediate accounting* (18th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Lambe, K. H. P., Palondongan, E., Ma'na, P., & Tandi, A. (2024). Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. *Al-Buhuts*, 20(1), 138–147. <https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4711>
- Lambe, K., Patiung, N., & Latiep, I. F. (2025). THE ROLE OF RISK MANAGEMENT IN STRENGTHENING THE IMPACT OF FINANCIAL LITERACY ON INVESTMENT DECISIONS. *Accounting Profession Journal (Apaji)*, 7(1), 60–71. <https://ojsapaji.org/index.php/apaji/article/view/286/168>
- Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
- Medea, F., Sabandar, S. Y., & Badawi, R. (2024). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 2(1), 45–51. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i1.226>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nurhayati, S., & Abdullah, W. (2020). Asset management and its effect on the quality of financial reporting in local governments. *Journal of Public Sector Accounting and Finance*, 2(1), 45–56. <https://doi.org/10.22219/jpsaf.v2i1.12345>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Pini, L., Rantererung, C. L., & Pasae, Y. (2025). Analisis Peran Fungsi Kompetensi dan Independensi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 8–13.

- <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.295>
Prasetyo, N., Pasae, Y., & Lambe, K. H. P. (2025). Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Memediasi Pengaruh Penatausahaan Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 108–119. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/884/738>
- Pratiwi, D., & Kusumawati, A. (2022). The role of information systems in improving the validity of local government financial reports. *Journal of Accounting and Public Policy*, 41(3), 101–118. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2021.106923>
- Rani, F., Wahyuni, R., & Prasetyo, H. (2021). Asset valuation methods and their impact on the reliability of local government financial statements. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(2), 89–103. <https://doi.org/10.24853/jakd.16.2.89-103>
- Sabandar, S., Tangdialla, R., & Tangdialla, L. (2022). Accountability And Transparency in The Industrial Revolution 4.0 Era at Private Universities in Makassar. *Proceedings of the 1st Warmadewa International Conference on Science, Technology and Humanity, WICSTH 2021, 2012*. <https://doi.org/10.4108/eai.7-9-2021.2318248>
- Sombo, S., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kualitatif di DPMPTSP Kabupaten Dogiyai). *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 61–69. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/990/>
- Widiati, W. N., Nugraha, A. A., & Novianty, I. (2021). Pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 45–56. <https://jurnal.polban.ac.id/iarj/article/view/2444>